

Dr. Akhmad Asyari, M.Pd.

SIKAP NASIONALISME

DALAM PEMBELAJARAN PKn



Dr. Akhmad Asyari, M.Pd.

SIKAP NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PKN



Elhikam Press Lombok

**SIKAP NASIONALISME
DALAM PEMBELAJARAN
PKN**

Penulis:
Dr. Akhmad Asyari, S.Ag., M.Pd.

Cetakan pertama: Januari 2018

Editor: Jumarim
Disain Cover: Amirul Muqtadar
Pra Cetak: Fitria

Penerbit:
CV Elhikam Press Lombok

Jl. Matahari Raya Blok E No 11 Mavilla Rengganis, Bajur, Lauapi
Lombok Barat NTB Phone : 087865227606
Email: elhikampresslombok@gmail.com

Perpustakaan Nasional:
Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-602-7644-46-5

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penerbitan buku ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku yang ada di tangan pembaca ini dengan judul Sikap Nasionalisme dalam pembelajaran PKn telah dikumpulkan materinya dari beberapa waktu yang lalu tapi baru kali ini dapat dipublish ke halayak oleh penerbit CV Elhikam Press Lombok.

Penyusunan buku ini telah banyak melibatkan banyak pihak, sehingga pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi material maupun nonmaterial dan mereka tidak dapat disebutkan satu persatu. Tapi pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada Saudara Jumarim yang telah berkenan menjadi editor pada buku ini dan penerbit dan percetakan CV Elhikam Press Lombok yang telah menerbitkan dan menyebarkan buku yang sangat sederhana ini.

Buku dengan mengedepankan isu yang cocok untuk pergerakan perkembangan komunitas pendidikan yang inten dalam menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini tidak bisa ditumbuhkan sim salabim tapi harus dilakukan secara terencana dan terprogram terutama melalui satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya,

dari sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan bahkan hingga perguruan tinggi. Menanamkan rasa nasionalisme ini tidak bisa hanya berpegang pada konsep dan teorinya saja tetapi harus dimulai dari rentetan historis bangsa yang penuh dengan liku-liku perjuangan hingga meraih kemerdekaan yang hakiki.

Buku ini tentu masih perlu kontribusi pemikiran dari semua pembaca sehingga masukan yang konstruktif sangat diharapkan.

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar isi.....	v

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

BAB II

SIKAP NASIONALISME	11
A. Pengertian Sikap Nasionalisme	11
B. Pentingnya Sikap Nasionalisme	24
C. Sikap Nasionalisme dalam Kurikulum PPKn	32

BAB III

HAKEKAT PEMBELAJARAN	49
A. Pengertian Belajar, Mengajar dan Pembelajaran	49
Sikap Nasionalisme Dalam Pembelajaran PPKn	v

B. Tujuan Pembelajaran	64
C. Materi Pembelajaran	70
D. Strategi Pembelajaran	77
E. Evaluasi Pembelajaran	81

BAB IV

PELAKSANAAN SIKAP NASIONALISME MELALUI PEMBELAJARAN PPKn

85

A. Tujuan Pembelajaran PPKn dalam Pelaksanaan Sikap Nasionalisme	85
B. Materi Pembelajaran PPKn dalam Pelaksanaan Sikap Nasionalisme	90
C. Strategi Pembelajaran PPKn dalam Pelaksanaan Sikap Nasionalisme	93
D. Evaluasi Pembelajaran PPKn dalam Pelaksanaan Sikap Nasionalisme	98

DAFTAR PUSTAKA

102

TENTANG PENULIS

109

BAB I

PENDAHULUAN

Sikap nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap nasionalisme sangat dibutuhkan dalam rangka membangun negara (*nation building*). Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat plural, merupakan kekayaan yang strategis apabila dimanfaatkan untuk memperkuat integritas dan kepribadian bangsa. Pluralitas tidak dijadikan sebagai ancaman dalam melaksanakan sikap nasionalisme, akan tetapi pluralitas dan perbedaan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar utama pentingnya kita melaksanakan sikap nasionalisme.

Sikap nasionalisme, mampu membangun bangsa ini dengan penuh kedamaian dan kekompakan, jiwa

kebersamaan, rasa tanggung jawab yang tinggi, toleransi dan tidak menjadikan perbedaan sebagai satu masalah. Kita sadar bahwa perbedaan sebagai solusi konstruktif dalam membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur.

Namun ketika keran reformasi dan desentralisasi dibuka lebar, perbedaan justru menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap nasionalisme mulai terlihat kabur, bahkan ancaman disintegrasi bangsa terlihat semakin terbuka lebar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlihat dengan munculnya “egoisme” lokal yang semakin tak terkendalikan di tingkat daerah, mereka lebih bangga mengatakan hal-hal seperti : *“Saya adalah putra daerah, dan seterusnya....”* akan tetapi mereka tidak bangga mengatakan *“saya adalah bangsa Indonesia”*.

Krisis nasionalisme mulai terlihat kabur dan egoisme lokal semakin mengemuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kerusuhan, kekacauan dengan alasan ideologi dan politik terjadi di berbagai daerah, seperti ekonomi masyarakat yang semakin menurun, peristiwa Sampit, Lampung Berdarah, Poso, Maluku dan peristiwa lainnya yang

justru secara “tak langsung” terwarisi oleh generasi muda dalam bentuk kekerasan, seperti terjadinya tawuran antar pelajar, tawuran antar sekolah di berbagai daerah yang dilakukan oleh generasi muda terpelajar. Kemudian timbul pertanyaan dari aspek kehidupan. Apakah ini merupakan budaya dari identitas bangsa Indonesia yang menyukai tindakan kekerasan? Apakah ini merupakan ketimpangan atau kecemburuan struktur sosial yang ada di negara ini? Atau ini merupakan kesalahan dari sistem pendidikan kita yang hanya menekankan pembelajarannya pada aspek kognitif saja? Satu kalimat secara makro yang dapat dijadikan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah terabaikannya makna nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi nasionalisme dalam suatu negara memerlukan sikap nasionalisme dari setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sikap nasionalisme dalam kehidupannya. Warga negara yang memiliki sikap nasionalisme pada hakikatnya adalah warga negara yang berusaha memikul tanggung jawab bersama dalam melaksanakan dan mengembangkan masa depan

bangsanya dengan terus menjaga nilai-nilai dasar persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila. Artinya dalam menyelesaikan masalah nasional bangsa, baik yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditempuh dengan jiwa kebersamaan dalam mencapai tujuan. Tentu dalam hal ini diperlukan sikap tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab.

Fenomena besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia pada saat ini adalah terjadinya kesenjangan, baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya yang disebabkan kurangnya persatuan dan kesatuan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajemukan budaya, pola pikir, ketidakmampuan dalam bermusyawarah, krisis merupakan tantangan utama dari fenomena besar tersebut, masalah tersebut harus segera diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik oleh elit politik maupun komponen rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kemasakan pendidikan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan khususnya masalah persatuan dan kesatuan atau "*nasionalisme*".

Reformasi dan reorientasi pendidikan Indonesia ke depan sangat memerlukan pendidikan kewarganegaraan, mustahil dalam membangun bangsa Indonesia yang plural, tanpa didasari pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan ini diharapkan generasi muda dapat dibentuk menjadi warganegara yang bersikap nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara.

Tempat yang strategis dalam pelaksanaan sikap nasionalisme adalah lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Keluarga merupakan tempat pendidikan pemula, artinya pendidikan pertama kali dirasakan dan didapat dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat berpotensi dalam membangun pelaksanaan sikap nasionalisme pada anaknya. Hal ini bisa dikembangkan melalui pengamalan ajaran agama, orang tua dengan praktik-praktik toleransi, menghargai perbedaan pendapat, jiwa disiplin. Yang muncul kemudian anggota keluarga akan terlatih untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan pendapat dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sikap nasionalisme juga dapat dikemas melalui media masa, informasi yang disampaikan melalui televisi, internet, radio, majalah

memberikan dampak terhadap pelaksanaan sikap nasionalisme. Melalui media masa ini, salah satunya siswa bisa membaca dan melihat fenomena aktual tentang problem persatuan dan kesatuan yang berkembang di masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa, berilmu, bermoral dan memiliki sikap nasionalisme. Secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berusaha menanamkan nilai, norma, dan moral, kepada peserta didik dengan tujuan agar memiliki pengetahuan tentang hukum, politik, moral dan sikap persatuan dan kesatuan atau nasionalisme. Pembelajaran PPKn lebih diarahkan kepada upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan dengan proses pengkajian dan praktik dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat sosial.

Tujuan, materi, strategi dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam upaya menerapkan konsep, nilai dan cita-cita bangsa. Komponen pembelajaran tersebut berusaha

dikemas sesuai dengan perkembangannya dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memberdayakan, memberikan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Darmodihardjo, dkk (1981) menjelaskan adalah benar bahwa Pancasila dapat dipergunakan sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia, karena memang di dalam Pancasila terkandung asas-asas persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia menjadi kokoh dan kekal.

Mata pelajaran PPKn juga mengembangkan berbagai kemampuan dasar warga negara seperti; bagaimana menjalankan kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bagaimana mengambil keputusan, berpikir kritis, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggung jawab atas segala ucapan dan perbuatannya, beriman dan bertaqwa sesuai dengan agamanya. Memiliki komitmen terhadap keputusan bersama, mengemukakan pikiran secara lisan dan tertulis, berargumentasi, memimpin orang lain, berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya sumber belajar tidak hanya terpaku pada buku pelajaran tetapi mencakup berbagai hal yang bersifat multi dimensi.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan atau nasionalisme guru PPKn harus secara cermat menggunakan strategi pembelajaran interaktif, seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial dan membahas suatu masalah dalam berbagai sudut pandang. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain memecahkan masalah secara kelompok, simulasi terhadap kegiatan tertentu, aksi sosial untuk membantu menangani masalah dalam masyarakat, pemecahan masalah yang praktis dan teoritis, karya wisata, dialog dengan anggota masyarakat, mengadakan perenungan sejarah perjuangan bangsa, serta dengan mengadakan debat tentang isu-isu yang aktual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dialog-interaktif yang bersifat partisipatoris sebagai model dan strategi guru dalam pembelajaran PPKn akan mengakibatkan interaksi antar siswa dengan guru dan antar sesama siswa sendiri. Supaya metode ini berjalan dengan baik harus dikedepankan sikap saling menghargai perbedaan pendapat, toleransi terhadap orang lain, kemampuan berpikir kritis, musyawarah yang sehat dan jujur, berupaya menyampaikan pendapat yang santun, dan saling mempercayai.

Pada umumnya dalam proses pembelajaran di kelas guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) lebih menekankan kepada aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotor, yang terjadi siswa memiliki pengetahuan tentang nasionalisme tetapi tidak mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembelajaran guru mengajar cenderung indoktrinasi, kurang memberikan kesempatan secara luas kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide, mengembangkan pengalaman dan potensi yang dimilikinya. Akibatnya siswa kurang kritis dan kreatif terhadap suatu permasalahan. Selama ini guru lebih banyak menggunakan ceramah yang hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, situasi ini menciptakan situasi belajar yang membosankan, siswa menjadi pasif dan kurang mendukung dalam pembentukan sikap nasionalisme.

Di samping itu, evaluasi yang dilakukan oleh guru, cenderung hanya menekankan pada skor nilai, nilai tertinggi menjadi patokan keberhasilan dalam pembelajaran PPKn, sementara untuk menilai sikap siswa pada hakekatnya tidak bisa hanya dengan mengedepankan skor nilai, akan tetapi dengan melihat

siswa dalam berbagai aspek; sikap keseharian dalam bergaul dengan sesama siswa, dengan guru dan pergaulannya dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagian dari penilaian yang tidak dapat dipisahkan.

BAB II

SIKAP NASIONALISME

A. Pengertian Sikap Nasionalisme

Sikap dalam arti sederhana dapat diartikan sebagai satu kesiapan mental atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu reaksi terhadap objek tertentu yang dipraktikkan dengan cara-cara tertentu pula. Thomas (Ahmadi, 1999) memberikan batasan bahwa sikap merupakan suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap seseorang selalu diarahkan terhadap objek tertentu. Tidak ada sikap tanpa objek atau tujuan yang jelas.

Sikap dalam perkembangannya, juga diartikan dalam berbagai versi oleh para ahli, namun pada umumnya sikap dikelompokkan dalam tiga kerangka pemikiran. *Pertama*, sikap didefinisikan sebagai bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. *Kedua*, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. *Ketiga*, sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 2002). Sedangkan Alport (Gable, 1986) berpendapat bahwa sikap adalah: *“An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual’s response to all objects and situations with which it is related”*. Artinya sikap adalah suatu kondisi kesiapan mental dan syaraf, yang diorganisasikan lewat pengalaman, yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamik terhadap tanggapan seseorang mengenai segala objek dan situasi dengan mana sikap itu berhubungan. Jadi disini sikap diartikan bukan sebagai tingkah laku akan tetapi suatu kesiapan memberikan respon tertentu apabila orang itu berhadapan dengan objek atau keadaan tertentu. Oleh

sebab itu sikap sesungguhnya tidak dapat dilihat tapi dapat disimpulkan dari tanda-tanda yang dapat diamati.

Thurstone (Walgito, 1980) berpendapat bahwa sikap adalah suatu tindakan, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek sosial psikologi. Afeksi positif yaitu senang, menimbulkan sikap menerima atau setuju, sedangkan afeksi negatif adalah sebaliknya, yaitu afeksi tidak senang, menimbulkan sikap menolak atau tidak setuju, hal semacam ini merupakan sikap sosial yang dominan terjadi dalam interaksi. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya (Zuchdi, 1995).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Azwar (2002) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dan diri individu. Beberapa faktor tersebut saling berinteraksi dalam pikiran seseorang yang menghasilkan sikap. Sikap merupakan dorongan untuk

merespon secara positif atau negatif terhadap objek, keadaan, konsep atau orang tertentu.

Pengertian nasionalisme hampir tidak ada bedanya dengan patriotisme, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Ada beberapa definisi tentang nasionalisme dan patriotisme; patriotisme diartikan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Kata *nation* atau bangsa mempunyai arti sosiologis, antropologis dan politik yang tidak sama. Dalam pengertian sosiologis, *nation* berarti suatu kelompok teritorial dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama, yang mempunyai karakteristik sama yang membedakannya dengan kelompok-kelompok lain yang sama (Soekanto, 1983). *Nation* dalam pengertian antropologis merupakan suatu kolektif manusia dengan solidaritas ditujukan kepada suatu identitas negara yang berdaulat. Selain itu juga *nation* mempunyai arti kolektif manusia, biasanya terikat karena kesatuan bahasa, dan kebudayaan dalam arti umum dan mempunyai wilayah tertentu (Suyono, 1985) *Nation* pada pengertian politik berbeda dengan bangsa, kata

bangsa mempunyai arti kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan saudaranya serta memiliki pemerintah sendiri. *Nation* dalam masyarakat yang memiliki wilayah, bahasa, dan kebudayaan sama dengan pemerintahan yang tidak menghidupkan praktik sistem dinasti (Krisna, 1993).

Dari konsep *nation* di atas muncul beberapa definisi tentang nasionalisme; dalam Ensiklopedia Indonesia, (1980) nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan tujuan. Ini sering dihubungkan dengan setiap hasrat untuk persatuan atau kemerdekaan nasional. Kemudian dalam *Encyclopedia of Sociology* disebutkan bahwa nasionalisme adalah kombinasi konsep guna mengidentifikasi antara orang, ideologi dari sejarah nasibnya dan gerakan sosial yang ditujukan untuk keikutsertaan yang objektif (Borgotta (ed), 1992). Sedangkan menurut Sargent (1987) nasionalisme adalah suatu ungkapan perasaan yang kuat dan merupakan usaha pembelaan daerah atau bangsa melawan penguasa luar. Identitas yang menjadi ciri khasnya adalah identitas masa lalu, suatu sejarah, nenek moyang, akar yang menempatkan diri dalam

suatu tradisi (sebagai suatu proses peleburan, perpaduan) dari suatu daerah, sejarah, bahasa, dan agama.

Kohn (1961) berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber dari pada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi. Nasionalisme mempunyai prinsip kesatuan, kebebasan, kesamarataan. Semua warga mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi, kepribadian nasional, dan prestasi.

Dengan demikian, kesetiaan terhadap bangsa dan negara harus lebih dikedepankan daripada kesetiaan terhadap kelompok dan golongan, sebagaimana yang diajarkan oleh para pejuang Indonesia terdahulu. Bung Karno misalnya, beliau selalu mengajarkan kepada rakyatnya untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, Bung Karno bersemboyan (Roem, 1972) Ia mengatakan "*My loyalty for my party ends, when my loyalty for my country begins?*". Artinya kesetiaan saya

bagi partai berakhir, dimana kesetiaan untuk negara mulai.

Dalam buku *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Dahm menggaris bawahi kesetiaan Bung Karno yang menakjubkan, tak tergoyahkan dan tetap tegar terhadap seperangkat gagasan yang telah dikembangkannya sejak awal karir politiknya dan yang terus dipertahankannya sampai saat terakhir. Sebuah ketegaran sikap yang dilukiskan Benda (Sudibyo, 1999). Ia mengemukakan sebagai, *“suatu kebesaran yang tragis pada diri seseorang, yang begitu yakin akan kebenaran dirinya, yang menganggap dirinya tak mungkin salah, dan begitu kedad terhadap fakta-fakta yang nyata dalam kehidupan politik Indonesia”*.

Dalam kekerasan hati Bung Karno terdapat karakter sebagai pemersatu. Banyak pengamat yang mengakui prestasi besar Bung Karno dalam menyatukan berbagai macam aliran, paham, dan kubu politik yang ada di Indonesia. *“Ia seorang penganjur dan pendamai yang ahli....,”* demikian pendapat Susan Abeyasekere tentang Bung Karno (Sudibyo, 1999). Harapan masyarakat Indonesia, hendaknya pemimpin kita mempunyai rasa, cipta dan karsa dalam

menumbuhkan dan melaksanakan semangat kebangsaan atau nasionalisme berbangsa dan bernegara.

Dalam tahun 1882 Renan (Sukarno, 1965) telah membuka pendapatnya tentang faham “bangsa” itu. “Bangsa” itu menurut pudjangga ini ada suatu njawa, suatu azas akal, jang terdjadi dari dua hal: pertamanya rakjat itu dulunja harus bersama-sama mendjalani satu riwayat; kedua, rakjat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukanja djenis (ras), bukanja bahasa, bukanja agama, bukanja persamaan butuh, bukanja pula batas-batas negeri jang mendjadikan “bangsa” itu.

Dari tempo-tempo belakangan, maka selainja penulis-penulis lain, sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa Otto Bauer-lah jang mempeladjadi soal “bangsa” itu. “Bangsa itu adaah suatu persatuan perangai jang terdjadi dari persatuan hal-ichwal jang telah didjalani oleh rakjat itu”. Begitulah katanja. Nasionalisme itu jalan, suatu iktikad; suatu *keinsyafan* rakjat, bahwa rakjat itu ada satu golongan, satu “bangsa”! (Sukarno, 1965).

Bangsa dibangun dengan pelaksanaan semangat nasionalisme sejati, dengan mengorbankan jiwa dan raga yang tidak sia-sia, marilah kita terus berjuang

dengan penuh keinsyafan, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Syarat yang pertama untuk menjadi bangsa yang merdeka ialah keinsyafan, bahwa kita adalah satu bangsa yang bersatu padu, yaitu bangsa Indonesia, yang bertanah air Indonesia. Lenyaplah dalam hati perasaan termasuk kedalam satu golongan kecil yang mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan kelompok. Karena dengan kebersamaan dan persatuan Indonesia bisa merdeka.

Dalam menyusun persatuan kita, marilah kita tanam dalam hati kita semangat syair persatuan yang dikarang oleh Schiller: Kita mau menjadi bangsa yang bersatu padu, Takkan terpisah-pisah dalam bahaya maupun sengsara, Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, seperti leluhur kita, Memilih mati daripada hidup menjadi budak. Kita bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Dan tak gentar akan kuasa manusia. (Hatta, 1945).

Syair tersebut mengajarkan, agar bangsa Indonesia tidak mudah pecah, goyah terhadap masalah yang dihadapi, tetapi harus berpendirian teguh dengan semangat nasionalisme. semangat nasionalisme tersebut harus tercermin dalam kehidupan ber-

masyarakat, baik pelaksanaan dalam kegiatan sosial maupun dalam toleransi umat beragama.

Opini Peran Pemuda dalam 20 tahunan Siklus Nasionalisme Indonesia (Refleksi 75 tahun Soempah Pemoeda, Syukri (2003) mengemukakan bahwa: Widodo Dwi Putro, seorang peneliti LP3ES Jakarta, menulis tentang nasionalisme di rubrik opini Kompas, Rabu 11 Juni 2003 lewat tulisan yang berjudul "*Nasionalisme Gelombang Keempat*". Ia mendefinisikan nasionalisme sebagai sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya.

Namun secara empiris, arti nasionalisme tidak sesederhana definisi tersebut, nasionalisme tidak seperti bangunan statis akan tetapi selalu dialektis dan interpretatif, sebab nasionalisme bukan merupakan pembawaan manusia sejak lahir melainkan merupakan hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Terbukti dalam sejarah Indonesia, kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh mahasiswa dan pemuda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya.

Akibat dari penyimpangan tersebut, memicu munculnya nasionalisme etnis, selimut kekecewaan akibat represi negara, brutalitas militer dan eksploitasi pusat atas kekayaan daerah kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme etnik dikalangan kelompok yang merasa tertindas makin tumbuh kuat. Misalnya kasus Aceh, salah satu ikatan kuat yang menumbuhkan nasionalisme etnik adalah karena mereka merasa memori ketertindasan. Berada di bawah payung pemerintah pusat sama tertindasnya dengan berada di bawah kolonialisme Belanda. Maka introspeksi sebuah bangsa sangat diperlukan dalam pelaksanaan sikap nasionalisme secara makro dalam menjamin persatuan dan kesatuan masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukidi (2003) mengemukakan: Jika nation didefinisikan oleh Benedict Anderson (1991) sebagai *“an imagined political community”*, maka bangkitnya nasionalisme etnik tidak saja sebagai proses dekolonisasi, tapi juga berangkat dari imajinasi-imajinasi kolektif di kalangan etnik tentang identitas, diri, sejarah masa silam, yang bisa menyatukan semangat kebersamaan.

Maka pemerintah dan aparat terkait harus menghilangkan budaya penyimpangan, keadilan harus

dikedepankan, sehingga pemicu-pemicu nasionalisme etnik menjadi kabur dan hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian pelaksanaan sikap nasionalisme secara umum akan terlaksana dan dijiwai oleh masyarakat Indonesia. Dalam percaturan kehidupan bernegara seringkali terjadi penyelesaian masalah kenegaraan dengan mengedepankan kekerasan, sehingga terkesan nasionalisme yang dibentuk bertentangan dengan HAM, padahal HAM dan nasionalisme merupakan satu kesatuan dalam kehidupan bernegara. Djanuarto (2001) berpendapat: Makna nasionalisme tidak bertentangan dengan HAM. Rasa nasionalisme tumbuh ketika warga negara merasa bahwa negara melindungi rakyatnya. Warga negara akan dengan ringan tangan menyumbangkan tenaga bahkan saat negara terancam jika negara memberi kenyamanan kepada masyarakat atau rakyatnya. Nasionalisme adalah sebuah rasa yang tumbuh dengan kesadaran rasional bukan dengan todongan senjata.

Maka kita sebagai sebuah bangsa, harus berupaya untuk menjadikan identitas, diri, sejarah masa silam sebagai perekat dalam melaksanakan sikap nasionalisme yang sejati, menghindari nasionalisme

etnik dan kelompok, sehingga terbentuk persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa dan negara yang penuh kedamaian, keadilan dan kemakmuran dalam kehidupannya.

Jadi sikap nasionalisme adalah satu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai satu cita-cita dan tujuan yang diikat dengan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi dan budaya. Nilai-nilai tersebut sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan, kesamarataan, tidak adanya sikap diskriminasi antara individu atau masyarakat yang satu dengan yang lainnya baik dalam kebijakan hukum, ekonomi, politik, budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam diri siswa sikap nasionalisme ini biasanya bisa dilihat dari tindakan kesehariannya, baik di kelas maupun dalam pergaulannya sebagai bagian dari masyarakat, dengan menunjukkan prestasi yang gemilang, sikap toleransi, bertanggung jawab, disiplin, mentaati semua peraturan, bersikap adil, saling menghargai, terbina kerjasama dengan baik antar siswa dan guru, mempunyai sikap tenggang rasa, mampu mengendalikan diri, saling tolong menolong satu sama lainnya dan selalu menunjukkan sikap yang positif baik

dalam konteks keberadaannya sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat.

B. Pentingnya Sikap Nasionalisme

Nasionalisme sebagai suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyerahkan kesetiannya pada bangsa dan negaranya, Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang multi etnik. Suryadinata (2003) mengemukakan bahwa: *“Indonesia is a multi-ethnic society, with more than 1,000 ethnic/sub ethnic groups. Nevertheless, the size of most ethnic groups is small, and only 15 groups have more than 1 million each”*. Maksudnya Indonesia adalah sebuah masyarakat yang multi etnik yang mempunyai lebih dari 1000 etnik atau kelompok sub etnik grup, dan masing-masing kelompok ada yang mempunyai grup yang sangat kecil dan hanya 15 kelompok yang mempunyai kelompok lebih dari 1 juta.

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai etnisitas atau ras yang banyak, yang secara akademik berasal dari keturunan nenek moyang, keberagaman membutuhkan suatu perhatian dalam mengakumulasi kepentingan dalam kehidupannya

sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberagaman etnisitas tidak jarang menumbuhkan polarisasi kepentingan dan kelompok. Kasus aktual yang terjadi dalam kurun terakhir di Indonesia yang kerap kali menimbulkan perpecahan disebabkan kurangnya sikap nasionalisme yang dipicu oleh kesenjangan sosial, politik, ekonomi antar masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat mampu menimbulkan benih sikap komunalisme. Arfa (1999) mengemukakan: Komunalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang menekankan satu kelompok agama sebagai unit tersendiri secara politis, ekonomi dan budaya. Paham tersebut cenderung bersifat antagonisme dan membawa perpecahan dalam satu bangsa. Sejarah mencatat bahwa paham komunalisme telah berhasil mengantarkan Timor-Timur lepas dari wilayah Republik Indonesia, meski hal ini dikatakan sebagai pelaksanaan demokrasi yang paling real yang pernah terjadi di Indonesia. Dan masyarakat Indonesia telah memberikan nilai kredit terhadap pemerintahan Indonesia. Namun bagi sebagian bangsa Indonesia masih bingung dengan makna demokrasi, peristiwa ini diartikan sebagai suatu kekalahan yang memalukan bagi bangsa Indonesia.

Terlepasnya Timor-Timur ini bagi yang lain terutama umat Islam dapat dipandang sebagai ketidakrelaan saudara mereka yang beragama katholik untuk dalam satu negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan yang selama ini mereka tunjukkan hanya merupakan kepalsuan dan *lip service* yang ditunjukkan oleh pemimpin mereka ketika bangsa Indonesia masih kuat mengontrol wilayah-wilayahnya. Akan tetapi ketika Indonesia diterpa oleh badai krisis moneter yang terus menerus dan mengoncang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukannya solidaritas yang mereka tunjukkan, malah mereka mengundang bangsa lain yang dari segi agama memang mereka lebih dekat untuk memaksa pemerintah Indonesia melepaskan mereka dari wilayahnya.

Paham komunalisme ini merupakan ancaman yang paling serius bagi keutuhan wilayah Indonesia dan potensi yang memungkinkan terjadinya disintegrasi. Paham nasionalisme dengan pemerataan dan keadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya akan mampu mengeliminir terjadinya disintegrasi bangsa dan berkembangnya paham komunalisme. Yang bukan mustahil akan mewujudkan

sikap primordialisme. Jalaluddin (Haikal, 2003) menjelaskan bahwa kesukuan sebagai salah satu wujud primordialisme dianggap menjadi kendala bagi berkembangnya gagasan nasionalisme.

Gagasan nasionalisme kemudian menjadi sangat penting dalam menciptakan diri, rasa solidaritas dan keutuhan negara, ditambah lagi dengan perkembangan dunia yang mengglobal, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin mudah dipengaruhi oleh budaya luar yang semakin banyak menggerogoti nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia saat ini masih sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka membangun bangsa. Nasionalisme dibutuhkan sebagai faktor pemicu dalam proses konsolidasi orde sosial politik yang dikerangkai oleh negara. Jadi upaya pelaksanaan sikap nasionalisme tidak dapat dilakukan dengan mudah, memerlukan usaha yang kolektif secara terus menerus karena masyarakat yang semakin beragam.

Namun demikian, dalam kehidupan berbangsa, pro kontra pentingnya dibangun paham kebangsaan atau nasionalisme terus bergulir. Pada zaman Bung Karno misalnya, banyak pihak-pihak yang menentang

atau tidak memerlukan paham kebangsaan atau nasionalisme atas dasar Pancasila, sebagaimana dijelaskan dalam pidato Bung Karno (1958) ketika memberikan kursus ketiga di Istana Negara tentang kebangsaan: “Saudara-saudara, saja ulangi bahwa Pantjasila adalah dasar negara. Hal ini saja tandaskan oleh karena kadang-kadang djustru mengenai Kebangsaan ada fihak-fihak jang berkata: “Kami tidak memerlukan faham atau pendirian Kebangsaan”. Misalnja dikalangan kaum internasionalis Marxis, --- jang menurut anggapan saja --- jang kurang mengerti betul tentang Marxisme. Saja ulangi, dikalangan internasionalis Marxis jang menurut anggapan saja kurang mengerti betul akan Marxisme, ada jang berkata: “Kebangsaan atau faham kebangsaan adalah salah, adalah bertentangan dengan faham internasionalism, betentangan dengan ide persaudaraan ummat manusia sedunia. Kabangsaan, faham kebangsaan adalah satu faham yang salah, faham yang telah membangunkan pertentangan-pertentangan dalam dunia ummat manusia, faham jang kadang-kadang sampai mendjadi sebab daripada peperangan-peperangan”.

Pendapat di atas terkesan bahwa kelompok atau orang-orang yang tidak setuju dengan paham kebangsaan atau nasionalisme, karena mereka melihat nasionalisme atau paham kebangsaan sebagai suatu paham yang sempit. Mereka melihat paham kebangsaan atau nasionalisme sebagai suatu paham yang mampu menimbulkan konflik horizontal, mereka melihat dengan paham kebangsaan akan memicu perbedaan antar bangsa.

Lebih jauh Bung Karno (1958) pada kesempatan yang sama menjelaskan, bahwa ada golongan-golongan dari pihak agama, yang kadang-kadang juga tidak menerima paham kebangsaan, beliau berkata: “Agama tidak mau menerima paham kebangsaan. Apalagi agama Islam, tidak mau menerima paham kebangsaan. Agama Islam hanya mengenal ummat manusia. Maka karena itu agama Islam menolak paham kebangsaan. Di dalam agama Islam, siapapun, dari bangsa apapun, asal dia taat dan taqwa kepada Tuhan, itulah kita punja saudara. Meski kulitnja hitam, meski kulitnja putih, meski kulitnja kuning, meski kulitnja merah-sawo, kami tidak membuat perbedaan antara bangsa dengan

bangsa. Kami hanya membuat perbedaan antara taqwa kepada Tuhan atau tidak taqwa kepada Tuhan”.

Pentingnya nasionalisme atau kebangsaan oleh golongan-golongan agama tersebut dilihat hanya dengan kaca mata agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan sebagai dasar faham kebangsaan, bukan agama karena Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi ada perbedaan yang tegas antara keperluan Pancasila sebagai dasar negara dan urusan agama.

Dalam ajaran Islam sebenarnya faham kebangsaan tidak bertentangan, dimana dalam ajaran Islam terdapat konsep *“chub-bul wathon, minal iman”*. Artinya mencintai tanah air atau bangsa adalah bagian dari iman. Realisasi kecintaan kepada bangsa diperlihatkan dengan faham kebangsaan, berupa sikap tolong menolong, berbuat adil dan banyak hal positif lainnya yang mendukung terjadinya keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemakmuran tidak akan terwujud jika tidak ada kemauan untuk merubah diri. Pelaksanaan sikap nasionalisme merupakan salah satu alternatif dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kaum muslimin Indonesia harus berkeyakinan bahwa Tuhan telah menciptakan dan mentitahkan kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia ini, ditengah-tengah persimpangan jalan antara dua samudra dan dua benua, yaitu tanah air Indonesia. Dan kita diwajibkan untuk memakmurkan tanah air ini atas kekuatan sendiri. Sebab siapa yang tidak percaya dengan kekuatan sendiri, tidak akan dibantu oleh Tuhan, sesuai dengan firman-Nya yang sering dikutip oleh Bung Karno (Abdulgani, 1964) Ia berkata : “Innallaha laa jughajjirumaa bi qaumin, hatta jughojjiruhu ma bi anfusihim”. (“Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu, apabila bangsa itu sendiri tidak mengubah djiwanja”). Dan atas dasar cinta kepada tanah air. Dan sesuai dengan sabda Nabi saw “chub-bul wathon, minal iman”, cinta tanah air atau patriotisme masuk dalam iman.

Begitu juga dalam diri siswa, sebagai generasi penerus dan tongkat estafet pemimpin masa depan, sikap nasionalisme penting dibentuk dan ditanamkan sejak dini, karena sikap nasionalisme akan memberikan kontribusi yang positif bagi siswa sebagai individu maupun sebagai bagian dari warga negara dalam

melakukan tindakan, sehingga dengan sikap itu akan menumbuhkan rasa kecintaan yang besar kepada bangsa dan sesamanya, sehingga mereka mampu membangun bangsa ini dengan konsep kebersamaan tanpa ada polarisasi kepentingan atau kelompok.

Pelaksanaan sikap nasionalisme sangat penting dan diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan integrasi nasional, namun mungkin yang perlu diperhatikan dan dipikirkan dalam pengembangan pengertian dan lingkup nasionalisme yang disesuaikan dengan perkembangan global dan etnisitas, sehingga nasionalisme yang muncul bukanlah nasionalisme semu.

C. Sikap Nasionalisme dalam Kurikulum PPKn

Sebenarnya perkembangan Kurikulum PPKn (dahulu PMP) sangat erat hubungannya dengan perkembangan kehidupan bernegara, terutama berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridiskonstitusional (situasi nasional) dan situasi internasional. Beberapa situasi yang mempengaruhi perkembangan Kurikulum PMP/PPKn adalah; *Situasi nasional* yang antara lain meliputi (a) ketetapan-ketetapan MPRS 1966 sampai

1968; (b) ketetapan-ketetapan MPR 1973; (c) ketetapan-ketetapan MPR 1978, khususnya sidang-sidang umum MPR(S) menghasilkan putusan-putusan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, *Situasi Internasional* pada tahun 1975 rezim komunis di Vietnam Utara, Laos, dan Kamboja berhasil menguasai sebagian besar wilayah daratan Asia Tenggara. Mereka telah keluar sebagai pemenang, mungkin karena “fanatik” terhadap komunisme dan “tahu” apa yang mereka perjuangkan. Kejadian ini tentu saja menimbulkan “kejutan-kejutan” pada negara-negara tetangganya termasuk Indonesia.

Maka dengan dasar pemikiran tersebut perlu penanaman Idiologi Negara, maka bagi bangsa Indonesia salah satu jalur yang ditempuh dalam menanamkan Idiologi Negara-terutama kepada anak didik atau generasi muda adalah melalui jalur pendidikan. Maka diperkenalkanlah istilah Civics dalam dunia pendidikan kita. Untuk menjelaskan sikap nasionalisme dalam kurikulum PPkn maka perlu kiranya penjelasan tentang apa itu Civics, Pengertian PPKn, fungsi dan ruang lingkup PPKn sebagai bagian dari karakteristik PPKn dalam kurikulum.

1. Civics

Secara historis kurikulum sekolah di Indonesia terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan kebangsaan atau nasionalisme, diantaranya pelajaran Civics (kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi Sejarah, ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics (kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara dan Civics Hukum (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994).

Menurut Randal (Soemantri, 2001) Civics di definisikan sebagai *“the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state.”* Artinya Civics atau ilmu kewarganegaraan membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dan hubungan individu dengan negara.

Menurut Kirschenbaum (1995) nilai-nilai fundamental dalam Civic education atau pendidikan

kewarganegaraan di Amerika yaitu kesejahteraan, hak-hak individual, persamaan hak, kebhinekaan, kebenaran dan patriotisme. Sedangkan aspek-aspek utama yang dibahas adalah pengetahuan menjadi warga negara yang baik, mengerti sejarah, apresiasi terhadap sistem demokrasi, HAM, tanggung jawab, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan mengatasi konflik (Kirschenbaum, 1995).

Objek Civics dan Civics Education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, sosial dan negara. Jadi Civics bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal UUD tetapi pelajaran Civics mencerminkan juga hubungan perilaku warga negara dalam kehidupannya sehari-hari dengan masyarakat lain dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hendaknya materi pelajaran Civics memasukkan unsur-unsur lingkungan, sosial, pendidikan, hukum, politik pemerintahan, agama, etika dan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya nasionalisme dalam kurikulum PPKn yang terbaru sudah termuat dalam GBPP sebagai materi pelajaran PPKn.

2. Pengertian PPKn

Pengertian PPKn sebenarnya sama dengan Civics, PKN dan PMP, karena PPKn merupakan nama mata pelajaran baru dalam kurikulum 1994 sebagai penyempurnaan dan pengganti mata pelajaran PMP dalam kurikulum 1984. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan Nasional, terutama dalam membina pribadi manusia Indonesia yang memiliki tanggung jawab, menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta terlaksananya sikap nasionalisme yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian PPKn dapat ditinjau dari pengertian Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Djahiri (1991), memberikan batasan yang tegas bahwa Pendidikan Pancasila merupakan perpaduan program yang terpadu antara PMP kurikulum 1975 dan PSPB kurikulum 1984, sebagian misi PSPB dan pendidikan kewarganegaraan seperti yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional.

Pengertian Pendidikan Pancasila sebagaimana rumusan di atas, cenderung melihat arti dari sudut pandang cakupan isi atau esensinya. Sedangkan dari

sudut pandang arah yang diinginkan pada pasal 39 ayat 2 undang-undang nomer 2 tahun 1989, menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila adalah program pendidikan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang dimaksud adalah: (a) Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, (b) Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, (d) Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mendukung kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat serta, (e) Perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sependapat dengan di atas, Soedirjo (1993) mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan program pendidikan yang mendukung tercapainya pribadi manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur,

mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan Pendidikan Pancasila merupakan program pendidikan yang mengarah pada moral untuk mencapai pribadi manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, mantap, mandiri, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan atau nasionalis. Pendidikan Pancasila ini sebagai program terpadu yang bulat, utuh dan kesinambungan antara pendidikan nilai dan moral, pendidikan politik dan kewarganegaraan yang harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat komprehensif.

Kemudian dalam rangkaian istilah yang utuh, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan muncul sebagai istilah yang kemudian dikenal dengan sebutan PPKn. Dalam GBPP PPKn (1994), dijelaskan bahwa: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan program pendidikan yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian Kewarganegaraan di dalam penjelasan pasal 39 UU No. 2/1989 adalah sebagai berikut: Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negaranya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, isi pokok dari pasal 39 UU No. 2/1989 adalah pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan (a) hubungan warga negara dengan negara, dan (b) pendidikan pendahuluan bela negara.

3. Fungsi PPKn

Fungsi mata pelajaran PPKn seperti yang termuat dalam (GBPP, 1994) adalah sebagai berikut: (a) melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat, (b) mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia

seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila, (c) membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dan negara, antara warga negara dengan sesama warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan (d) membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 yang sudah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jadi berdasarkan fungsi tersebut, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat dinamis dan mampu menarik perhatian peserta didik. Sekolah harus membantu peserta didik mengembangkan pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang berupa kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Dengan pembelajaran yang bermakna, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi intelektual yang menghasilkan pemahaman tentang arti kebangsaan atau nasionalisme. Di samping itu, peserta didik akan memperoleh keuntungan dan kesempatan dari pem-

belajaran yang bermakna untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (*politics*) dan penyelenggaraan organisasi yang baik (*good govermance*) pada tingkat kelas dan sekolah mereka sendiri.

Pengembangan potensi intelektual dan keterampilan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak dapat terpisahkan dari materi kewarganegaraan, sebab untuk dapat berpikir secara kritis tentang isu, latar belakang, dan hal-hal kontemporer yang relevan juga harus memiliki perangkat berpikir intelektual. Perangkat berpikir intelektual tersebut meliputi kemampuan untuk menilai, membangun (*to construct*) dan memberikan justifikasi posisi pada suatu. Keterampilan dan kemampuan berpartisipasi dalam proses politik, pelaksanaan sikap juga diperlukan bagi peserta didik. Hal ini meliputi kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan keputusan melalui kerjasama dengan orang lain dengan cara mengetahui tokoh kunci pembuat kebijaksanaan dan keputusan, membangun koalisi, bernegosiasi, mencari konsensus dan mengendalikan konflik, hal seperti ini merupakan manifestasi dari terbentuknya sikap nasionalisme dalam diri siswa. Pendidikan PPKn tidak hanya sekedar

diajarkan kepada siswa, akan tetapi setelah diajarkan kemudian mampu dihayati dan diamalkan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan sebagai siswa maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Ruang Lingkup PPKn

(a) Nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) Kehidupan idiologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan nilai mencakup wawasan budi pekerti, nilai, norma dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki kemerdekaan, secara moral manusia memiliki kemerdekaan untuk memilih nilai dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah laku dalam hidup bersama dengan manusia lainnya. Nilai yang

diambil adalah nilai yang tinggi, luhur, mulia. Norma yang diambil adalah mendekatkan hidupnya kepada yang memberi hidup agar selamat di dunia dan akherat. Moral memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan tanggung jawab sesuai dengan nilai, norma yang dipilih. Jika pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah masuk dalam diri siswa, maka akan terbentuknya sikap nasionalisme yang diekspresikan dengan kemampuan melakukan penghayatan dan pengamalan Pancasila, kemudian akan muncul kemampuan memilih mana nilai yang baik dan harus diamankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, praktik kesesuaian. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang

diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati (Linda, 1995). Nilai-nilai tersebut merupakan pokok bahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, sebenarnya perilaku-perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok-pokok bahasan pendidikan nilai yang sekarang berlangsung. Persoalannya ialah bagaimana cara mengajarkannya agar mereka terbiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud.

Nilai adalah suatu pengertian atau penafsiran yang digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda. Maka ketika manusia menganggap sesuatu bernilai, karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya dalam kehidupannya. Fraenkel (Subandrio, 2002) mengatakan nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipraktekkan.

Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai adalah standar tingkah laku manusia yang merupakan hasil kesepakatan bersama dijadikan dasar

untuk bertindak adil dan benar dalam hidup. Selain itu nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.

Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai tersebut bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dan dihayati oleh manusia. Agar nilai ini berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu dikongkritkan dalam bentuk norma.

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur dan aman. Menurut Poespoprodjo (1986) norma adalah aturan, standar, ukuran.

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa norma adalah kaidah, aturan, ketentuan, kriteria, standar dan ukuran yang berlaku di masyarakat untuk dipatuhi agar tertib, teratur dan aman. Norma-norma yang berada di masyarakat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum

Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral. Norma moralitas adalah aturan, standar, ukuran

yang dapat digunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan moralitas yang dimilikinya. Moralitas seseorang tercermin dalam sikap dan perilakunya.

Moral berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Kata *mores* ini mempunyai sinonim; *mos, moris, manner mores* atau *manners, morals* (Poespoprodjo, 1986). Dalam bahasa indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani, yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kaelan (2001) mengatakan moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Kohlberg (Reimer, 1979) berpendapat bahwa moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan perspektif atau cara pandang tertentu.

Dengan demikian, dari ketiga pendapat tersebut dapat dikatakan moral adalah ajaran atau pedoman

yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak.

Djahiri (Maman, 2000) ada delapan pendekatan dalam penilaian pendidikan nilai dan moral yaitu: *Evocation*, *Inculcation*, *Moral reasoning*, *Value clarification*, *Value analysis*, *Moral awarenses*, *Commitment aproach*, *Union Aproach*. *Evocation* adalah pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasan untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya, *Inculcation* adalah pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap, *Moral reasoning* adalah pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah, *Value clarification* adalah pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral, *Value Analysis* adalah pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral, *Moral Awarenses* adalah pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadaran akan nilai tertentu, *Commitment aproach* adalah pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu

pola pikir dalam proses pendidikan nilai, *Union aproach* adalah pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara riil apa yang di dapat dalam suatu kehidupan.

BAB III

HAKEKAT PEMBELAJARAN

A. Pengertian Belajar, Mengajar dan Pembelajaran

Banyak sekali pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, pendapat yang satu dengan yang lainnya terkadang terlihat berbeda, akan tetapi sebenarnya semua teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli saling melengkapi dan mendukung teori yang satu dengan teori lainnya.

Crow dan Crow (Knowles, 1979) mengemukakan bahwa belajar adalah: *“Learning involves change. It is concerned with the acquisition of habits, knowledge, and attitudes. It enables the individual to make both personal and social adjustments. Since the concept of change is*

inherent in the concept of learning, any change in behavior implies that learning is taking place or has taken place. Learning that occurs during the process of change can be referred to as the learning process”.

Pendapat di atas bermaksud bahwa belajar melibatkan perubahan. Belajar berkenaan dengan mendapatkan kebiasaan, ilmu pengetahuan, sikap (tujuan belajar adalah untuk mendapatkan kebiasaan, ilmu pengetahuan dan sikap), ketika belajar telah terjadi ketiga hal tersebut tentu mengalami perubahan. Konsep perubahan yang terjadi sangat inheren (menyatu) dengan konsep belajar, beberapa perubahan-perubahan dalam tingkah laku mengindikasikan sedang terjadi dan telah terjadinya perubahan. Perubahan belajar yang terjadi selama proses perubahan dapat didefinisikan sebagai proses belajar.

Burton (Knowles, 1979) lebih lanjut mendefinisikan belajar sebagai berikut: *“Learning is a change in the individual, due to the interaction of that individual, and his environment, which fills a need and makes him more capable of dealing adequately with his environment”.* Ini berarti bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam individu yang disebabkan interaksi

individu dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan membuat kemampuan yang tinggi dalam menghadapi tantangan atau persoalan kehidupannya.

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami siswa sendiri, siswa adalah penentu atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar.

Belajar merupakan dinamika yang kompleks, sehingga beberapa pendapat yang saling mendukung yang satu dengan yang lainnya mengenai apa itu belajar. Skinner (Dimiyati & Mudjiono, 2002) berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal sebagai berikut:

1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pebelajar;

2. Respons dipebelajar; dan
3. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Penguatan terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respons sipebelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku respons yang tidak baik diberi teguran atau hukuman.

Seorang guru dapat menyusun program pembelajaran berdasarkan pandangan Skinner. Pandangan Skinner ini terkenal dengan nama teori Skinner, guru perlu memperhatikan dua hal yang penting, yaitu (1) pemilihan stimulus yang diskriminatif, dan (2) penggunaan penguatan. Sebagai ilustrasi, apakah guru akan meminta respons ranah kognitif atau afektif. Jika yang akan dicapai adalah sekedar “menyebut Mataram sebagai kota provinsi Nusa Tenggara Barat”, tentu saja siswa hanya dilatih untuk menghafal.

Belajar menurut pandangan Piaget (Dimiyati & Mudjiono, 2002) berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk individu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi

dengan lingkungan maka fungsi intelektual siswa semakin berkembang.

Perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut. (1) sensori motor (0;0-2;0 tahun), (2) pra-operasional (2;0-7;0 tahun), (3) operasional konkret (7;0-11;0 tahun), dan operasi formal (11;0-ke atas).

Pada tahap sensori motor anak mengenal lingkungan dengan penglihatan, pembau, pendengaran, perabaan dan menggerak-gerakannya. Pada tahap pra-operasional, anak mengandalkan diri pada persepsi tentang realitas. Ia telah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, berpartisipasi, membuat gambar dan menggolong-golongkan. Pada tahap operasi konkret anak dapat mengembangkan pikiran logis. Ia dapat mengikuti penalaran logis, walau kadang-kadang memecahkan masalah "*trial and error*". Pada tahap operasi formal anak dapat berpikir abstrak seperti pada orang dewasa.

Pengetahuan akan dibangun dalam pikiran. Maka setiap individu akan membangun sendiri pengetahuannya. Pengetahuan yang dibangun terdiri dari tiga bentuk, yaitu pengetahuan fisik, pengetahuan logika matematik dan pengetahuan sosial.

Belajar pengetahuan meliputi tiga fase. Fase-fase itu adalah fase eksplorasi, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep. Dalam fase eksplorasi, siswa mempelajari gejala dengan bimbingan. Dalam fase pengenalan konsep, siswa mengenal konsep yang ada hubungannya dengan gejala. Dalam fase aplikasi konsep, siswa menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain lebih lanjut.

Menurut Piaget (Dimiyati & Mudjiono, 2002) pembelajaran terdiri dari empat langkah berikut:

1. *Langkah satu:* menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri,
2. *Langkah dua:* memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut,
3. *Langkah tiga:* mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah,
4. *Langkah empat:* menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi.

Singkatnya, sebenarnya Piaget menyarankan agar dalam proses pembelajaran guru memilih masalah

yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplanasi.

Menurut Gagne (1977) *“Learning is a change in human disposition or capability which persists over a period of time, and which is not simply ascribable to processes of growth.”* Artinya belajar adalah merupakan suatu perubahan dalam disposisi atau susunan manusia, yang bisa didapatkan dari proses pertumbuhan. Sedangkan perubahan tingkah laku dalam belajar menurut (Kirpatrick, 1994) ada tiga yaitu (1) perubahan sikap, (2) peningkatan pengetahuan, (3) perubahan keterampilan. Dipertegas lagi oleh Achmadi (1984) menyatakan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Perubahan tingkah laku tersebut, baik yang menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun perubahan nilai dan sikap dapat terjadi di dalam maupun di luar kelas. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang mengajar atau tidak.

Sedang menurut Slameto (1995) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya, karena itu tidak semua perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Slameto (1995) menjelaskan hal ini secara rinci, bahwasanya perubahan tingkah laku dalam arti belajar memiliki ciri-ciri: (1) perubahan yang terjadi secara sadar, (2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, (5) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah, dan (6) perubahan mencakup seluruh tingkah laku.

Berkaitan dengan belajar di atas, dikemukakan rumusan belajar yang aktual dari *United Nation of Education Social Culture Organization* (UNESCO). (Tilaar, 1999) “Belajar pada abad 21 haruslah didasarkan pada empat pilar yaitu; (1) *learning to think*, (2) *learning to do*,

(3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.” Tilaar menjelaskan, manusia tidak mungkin lagi menguasai arus informasi yang begitu cepat berubah dan semakin lama semakin banyak, sementara kemampuan otak manusia terbatas. Oleh karena itu, proses belajar mengajar yang terus menerus yang terjadi seumur hidup adalah bagaimana berpikir. Selanjutnya, manusia tidak sekedar hanya dapat berpikir tetapi harus berbuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Manusia pada abad 21 juga harus secara sadar bertindak bagaimana untuk tetap hidup, dan perlu lebih mempererat hidup bersama dengan bangsa lain.

Clyton (Beane, 1986) terdapat lima prinsip pembelajaran yang berguna yaitu sebagai berikut: (1) *Learning is a process that involves behavior, sequences of events and outcomes*, (2) *Learning results from experiencing. The learner must in some way act upon or react to a situation that impinges upon him*. (3) *Learning depends upon what the learner does. This involves how he perceives, how he thinks, how he feels and how he acts. There can be no learning unless he responds in some way* (4) *The end result of the learning process is some change in the learner, demonstrable by a change in*

his behavior, potential or actual. (5) The change in the learner tends to be fixed in the consequences of his behavior in terms of his own motivational systems.

Artinya (1) belajar adalah suatu proses yang melibatkan tingkah laku, rangkaian peristiwa dan hasil (2) Belajar adalah hasil dari pengalaman. Pelajar dalam beberapa hal harus bertindak atau bereaksi terhadap situasi yang menganiayanya (3) Belajar tergantung apa yang dilakukan pelajar, ini melibatkan bagaimana memahami, bagaimana ia berpikir, bagaimana ia merasakan, dan bagaimana ia bertindak. (4) Hasil akhir dari proses pembelajaran adalah adanya beberapa perubahan perilaku, potensi atau aktual. (5) perubahan dalam diri pelajar cenderung tetap sebagai akibat dari perilakunya dalam hal sistem motivasi.

Dari kelima prinsip tersebut menekankan bahwa, sesungguhnya yang aktif belajar adalah pelajar, bagaimana mereka memahami, berpikir, merasakan, bertindak dan bereaksi terhadap situasi yang mengeniayanya sehingga menghasilkan perubahan.

Seperti halnya pengertian belajar, batasan mengajar juga mengalami pergeseran. Howard (Roestiyah, 1982) berpendapat mengajar adalah suatu aktivitas

untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita, penghargaan dan pengetahuan. Implikasinya guru bukan hanya sebagai distributor pengetahuan melainkan orang yang cakap membawa peserta didik pada kondisi belajar. Hal ini sejalan dengan definisi mengajar di negara-negara yang sudah modern. Mengajar didefinisikan sebagai: "*Teaching is guidance of learning*. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar." (Slameto, 1995). Definisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah siswa, yang mengalami proses belajar, sedangkan guru hanya bertugas membimbing, menunjukkan jalan dengan mempertimbangkan kepribadian siswa. Kemampuan untuk berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa.

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan dalam kelas.

Menurut Mukminan (1998) istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata *instruction* dalam bahasa Inggris, yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya adalah membantu orang belajar, atau memanipulasi lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Gagne dan Brigs (1979) mengartikan: “*Instruction* atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal”.

Sepintas pengertian mengajar hampir sama dengan pembelajaran, namun pada dasarnya berbeda. Dalam pembelajaran kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang atau guru. Aktivitas guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal disebut dengan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi

lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai strategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal.

Menurut Surakhmad (1982) dalam proses belajar mengajar yang hakekatnya merupakan proses edukatif paling sedikit, harus terdapat: (1) tujuan yang jelas yang akan dicapai, (2) bahan yang menjadi isi interaksi, (3) siswa yang aktif mengalaminya, (4) guru yang melaksanakan, (5) metode tertentu untuk mencapai tujuan, (6) situasi yang memungkinkan proses interaksi berlangsungnya dengan baik, dan (7) evaluasi atau penilaian terhadap hasil interaksi itu. Komponen proses belajar mengajar tersebut harus diintegrasikan dan membentuk sistem yang paling berhubungan sehingga mampu menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Sistem pendidikan memberikan siswa skill untuk merubah masa depan mereka, seperti diungkapkan oleh Bell (Kirschenbaum, 1995): *“If the (educational) system worksit provides students with the skill and desire to learn and to keep on learning through life, it prepares*

them for rewarding career in a field of their choice. It give them the ability to make wise decisions about their personal life and to participate responsibly in the democratic processes of our society. Most of all--and I think this is too often over-looked--education should teach young people how to enjoy life, how to get a kick out of it. Life is a great experience if you're trained and confident and know where you're going. An education that meets all these requirements is by far the greatest gift that America can bestow upon its young people”.

Sistem pendidikan memberikan siswa skill dan keinginan untuk belajar dan meningkatkan untuk belajar sepanjang masa. Sistem pendidikan menyiapkan mereka peluang masa depan dalam pilihan hidup mereka. Sistem ini juga memberikan mereka kemampuan untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang banyak tentang kehidupan personal dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan bersatu. Yang paling penting adalah pendidikan harus mengajarkan siswa bagaimana mengatasi hidup (masalah dalam kehidupannya). Kehidupan merupakan suatu peng-

alaman yang sangat besar jika dilaksanakan, dijiwai dan dipahami dimanapun kita berada.

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan berlangsungnya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila dalam dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa dan sebagainya. Dalam pembelajaran hasil belajar dapat dilihat langsung, oleh karena itu agar kemampuan siswa dapat dikontrol dan berkembang semaksimal mungkin dalam proses belajar di kelas maka program pembelajaran tersebut harus dirancang terlebih dahulu oleh para guru dengan memperhatikan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran yang telah diuji keunggulannya.

Sementara itu menurut Wittig (Syah, 1995) proses belajar berlangsung dalam tiga tahapan yaitu *acquasition* (tahap perolehan informasi), pada tahap ini pembelajar mulai menerima informasi sebagai stimulus yang memberikan respon sehingga ia memiliki pemahaman atau perilaku baru. Tahap *aguasition* merupakan tahapan yang paling mendasar, bila pada tahap ini kesulitan siswa tidak dibantu maka ia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi tahap

selanjutnya. *Storage* (penyimpanan informasi), pemahaman dan perilaku baru yang diterima siswa secara otomatis akan disimpan dalam memorinya yang disebut *shortterm* atau *longterm memory*. *Retrieval* (mendapatkan kembali informasi atau ingatan), apabila seorang siswa mendapat pertanyaan mengenai materi yang telah diperolehnya akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapinya. Tahap *retrieval* merupakan peristiwa mental dalam rangka mengungkapkan kembali informasi, pemahaman, pengalaman yang telah diperolehnya.

B. Tujuan Pembelajaran

Agar tidak terjadi kerancuan dan ketidak jelasan dalam proses belajar mengajar, maka perlu ada tujuan dari pembelajaran yang dilakukan, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih berfokus dan mengarah pada hasil yang diharapkan dan telah ditetapkan dalam GBPP. Tujuan yang dimaksudkan adalah tercapainya aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam diri siswa.

Tujuan pembelajaran PPKn adalah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab serta memberi bekal kemanapun untuk mengikuti di jenjang pendidikan menengah (GBPP, 1994).

Menurut Sukaya, dkk (2002) berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/2000, tujuan pendidikan Kewarganegaraan mencakup:

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan hubungan antara warga negara dengan negara lain serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan bangsa dan negara.

2. Tujuan Khusus

Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur

dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab.

- a. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
- c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan negara.

Kemudian Pasha, dkk. (2002) menegaskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah:

- a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.

- b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak di atasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa, bangsa, negara serta kemanusiaan.

Dilihat dari beberapa batasan di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan Pendidikan/pembelajaran Kewarganegaraan di atas tidak lain merupakan yang secara bersama-sama diarahkan untuk tercapainya tujuan Pendidikan Nasional yang antara lain adalah “.....Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan”

Menurut Undang-undang No. 2/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam Bab II

pasal 2, 3, 4 berturut-turut tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan dikemukakan sebagai berikut :

Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Udin Saripuddin, 1989).

Jelasnya tujuan utama diajarkannya Pendidikan Kewarga-negaraan adalah untuk menumbuhkan pelaksanaan sikap warga negara yang patriotik/nasionalis,

yang memiliki keinsyafan yang tinggi akan hak dan kewajibannya selaku warga negara, lebih jauh dapat dikatakan pembelajaran PPKn tersebut di atas pada dasarnya juga dapat memberikan bekal kepada siswa untuk (1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi “*issue*” kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis, (4) mempunyai kemampuan untuk memahami, menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

Dalam panggung sejarah perjuangan bangsa Indonesia ada sekian banyak para mujahid, patriotis/nasionalis bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya demi kejayaan bangsa dan negara. Mereka bagaikan permata mutu manikam yang dengan indahnyanya menghiasi persada Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nama panglima besar Sudirman misalnya, yang dengan kondisi yang tidak mengijinkan kesehatannya terus dengan gigih berjuang

mempertahankan bangsa dan negara ini dari rongrongan penjajah. Namun kita sebagai pelajar dan mahasiswa tidak dituntut untuk itu, akan tetapi bagaimana kita mampu mewujudkan perjuangan yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh pejuang terdahulu kita hargai dengan melaksanakan sikap nasionalis pada diri kita, tentunya jiwa nasionalis kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa dengan pejuang terdahulu akan berbeda, jiwa nasionalisme kita bisa diwujudkan dengan sikap saling menghargai, kompak, toleransi, berpikir yang rasionalis, memperlihatkan prestasi yang gemilang sesuai dengan ajaran yang dianjurkan dan termuat dalam nilai-nilai Pancasila.

C. Materi Pembelajaran

Bidang studi Pendidikan Moral Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang studi yang penting dan strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendidikan dan pengajaran PMP diharapkan akan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pemahaman yang benar tentang Pancasila dan nilai-nilai moral yang terkandung

didalamnya sehingga mampu melaksanakan sikap nasionalis dalam diri siswa.

Adanya ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, maka semakin memantapkan perlunya pengajaran bidang studi PMP di sekolah, karena pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menjadi isi pokok bidang studi PMP di samping materi yang bersumber dari UUD 1945 dan GBHN serta realita kehidupan bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur pancasila, yang menuntut terbentuknya manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Luhur Pancasila.

Dalam suplemen GBPP PPKn terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pokok bahasan yang berstatus “tidak diajarkan” mengandung dua makna, yaitu:
 - a. digabung dengan pokok bahasan yang sama pada kelas dan catur wulan yang berbeda, dan
 - b. ditunda sampai dengan adanya rujukan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pokok bahasan yang berstatus “tetap diajarkan”

Dengan adanya pedoman pembelajaran di atas, maka pokok-pokok bahasan dalam materi yang berstatus tidak diajarkan, dapat diajarkan kembali dengan menggunakan deskripsi materi yang berbeda dengan deskripsi materi sebelumnya.

Komposisi pokok-pokok bahasan sebagaimana yang dijelaskan dalam suplemen telah berubah dan dapat membawa implikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, yaitu:

1. Pokok-pokok bahasan pada caturwulan tertentu dapat diajarkan pada caturwulan lainnya dalam tingkat kelas yang bersangkutan
2. Alokasi waktu yang berlebihan pada caturwulan tertentu dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam rangka memperdalam dan memperluas wawasan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif pada caturwulan yang bersangkutan.
3. Penyusunan kembali rencana mengajar yang berlaku baik untuk satu tahun maupun untuk satu caturwulan.

Materi pembelajaran PPKn berdasarkan GBPP 1994, dideskripsikan dalam tabel berikut:

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
dan kewarganegaraan

Satuan Pendidikan : SMA

Tabel 1

Kurikulum 1994 untuk kelas I

Kelas/ Cawu	PB/SPB Kurikulum 1994	Status
1/1	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi • Menghargai • Cinta tanah air • Kebijakanaksanaan • Pengabdian 	<p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>
1/2	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Persamaan derajat • Patriotisme • Musyawarah • Gotong Royong 	<p>Tidak diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>

1/3	• Keselarasan	Tetap diajarkan
	• Kasih sayang	Tidak diajarkan
	• Kewaspadaan	Tidak diajarkan
	• Ketertiban	Tetap diajarkan
	• Kepentingan Umum	Tetap diajarkan

Tabel 2

Kurikulum 1994 untuk kelas II

Kelas/ Cawu	PB/SPB Kurikulum 1994	Status
II/1	• Ketaqwaan	Tetap diajarkan
	• Keramah tamahan	Tetap diajarkan
	• Kesatuan	Tetap diajarkan
	• Keikhlasan	Tetap diajarkan
	• Kedisiplinan	Tetap diajarkan
II/2	• Saling menghormati	Tetap diajarkan

	<ul style="list-style-type: none"> • Keserasian • Kesetiaan • Tanggung Jawab • Kesederhanaan 	<p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>
II/3	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama • Martabat dan hargadiri • Persatuan dan kesatuan • Demokrasi Pancasila • Kecermatan dan hidup hemat 	<p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p>

Tabel 3

Kurikulum 1994 untuk kelas III

Kelas/ Cawu	PB/SPB Kurikulum 1994	Status
III/1	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan 	Tetap diajarkan

	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan dan kebenaran • Kebanggaan • Ketaatan • Keadilan 	<p>Tidak diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>
III/2	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan • Kecintaan • Kebulatan tekad • Keikhlasan • Bekerjasama 	<p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tidak diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>
III/3	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Tenggang rasa • Kesetiaan • Pengendalian diri • Tolong menolong 	<p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p> <p>Tetap diajarkan</p>

Dalam tabel tersebut dijelaskan beberapa materi yang tidak diajarkan, tidak diajarkan bukan berarti ditiadakan, tetapi digabung dengan materi lain, karena

adanya pertimbangan waktu, apabila waktu memungkinkan materi tersebut diajarkan kepada siswa.

D. Strategi Pembelajaran

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi atau metode, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan sehingga apa yang menjadi target pembelajaran yang kita sampaikan bisa dicapai dengan hasil yang maksimal. Salah satu langkah untuk memahami tentang teknik penyajian mendalam dan terinci, untuk memahami dan mendalami teknik penyampain pelajaran.

Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa didalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat dtangkap, dipahami dan dapat digunakan oleh siswa dengan baik (Roestiyah, 1991).

Ada banyak macam strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, ada yang menekankan peranan guru yang utama dalam pelaksanaan

penyajian; tetapi ada pula yang menekankan pada media hasil teknologi modern seperti televisi, radio, kaset dan sebagainya.

Membangun kesadaran peserta didik agar merasa perlu melakukan kegiatan belajar, ia harus menempuhnya dengan berbagai strategi. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap terjadinya proses dan hasil pembelajaran. Oleh sebab itu, strategi ini perlu dipilih dan ditetapkan setepat mungkin agar pembelajaran lebih berhasil secara efektif dan efisien.

Banyak sekali para ahli yang mempunyai pendapat tentang strategi pembelajaran. Istilah "*strategi*" yang berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang pada awalnya berarti "*the art of general*" atau seni panglima untuk memenangkan peperangan (Sudirdjo, 1991). Jadi seni dalam permasalahan ini berarti siasat dalam peperangan. Jadi seni adalah suatu siasat yang dipakai oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Maka siasat yang demikian juga bisa dipakai dalam bidang pembelajaran, sehingga dalam bahasan ini disebut dengan istilah strategi pembelajaran.

Strategi pembelajaran adalah cara-cara atau pola-pola umum perbuatan guru murid dalam kegiatan

belajar mengajar. Sedangkan menurut Mujiono (1985) strategi pembelajaran diartikan sebagai siasat untuk mengoptimalkan komponen-komponen instruksional. Sementara Degeng (1993) mengemukakan bahwa dalam strategi pembelajaran itu meliputi atau mencakup kegiatan-kegiatan mengorganisasi isi, menyampaikan isi dan mengelola pembelajaran.

Namun saat ini kita melihat, ada beberapa metode yang lazim dipakai dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas, latihan inkuiri, karyawisata, kerja dalam kelompok, bermain peranan, simulasi, seminar, studi kasus, dan lain-lain (Danim, 1995). Sementara menurut Roestiyah (1982) dalam interaksi belajar mengajar terdapat beberapa metode menyampaikan materi agar proses itu dapat berjalan dengan baik, diantaranya: (1) metode diskusi, (2) kerja kelompok, (3) penemuan, (4) simulasi, dan (5) satuan pengajaran.

Slameto (1995) mengatakan, tidak ada satu metode mengajar yang paling baik, karena baik tidaknya metode tergantung pada tujuan pengajaran, kesanggupan individual, dan lain-lain. Dalam hal ini Slameto memberikan pedoman yang harus diperhatikan oleh guru dalam menggunakan metode mengajar,

bahwa penggunaan metode hendaknya disesuaikan dengan karakteristik tujuan pengajaran, bahan pengajaran, situasi pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung, waktu yang tersedia, serta kemampuan latar belakang kemampuan peserta didik.

Metode pengajaran yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar PPKn berdasarkan buku panduan atau petunjuk teknis (1997) antara lain: Ceramah, ekspositorik, tanya jawab, klasifikasi, kasus dan contoh, laporan dokumen, laporan kerja kelompok, permainan andai-andai, observasi lapangan, pemantauan keadaan, tayangan televisi, diskusi, permainan, jurnal harian, simulasi, pengembangan model partisipasi masyarakat, model kehidupan keluarga idola, analisis nilai moral, klarifikasi nilai moral eksibisi.

Dari berbagai macam metode atau strategi pembelajaran tersebut, ada beberapa metode yang cukup relevan dalam pembentukan sikap nasionalisme melalui pembelajaran PPKn yaitu metode diskusi, kerja kelompok, klasifikasi nilai, analisis nilai moral, studi kasus, dan sebagainya.

E. Evaluasi Pembelajaran.

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin mengetahui hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Seringkali pula, orang yang melakukan kegiatan tersebut, berkeinginan mengetahui baik atau buruknya kegiatan yang dilakukannya. Siswa dan guru merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya, tentu mereka juga berkeinginan mengetahui proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk menyediakan informasi tentang baik dan buruknya proses dan hasil kegiatan pembelajaran, maka seorang guru harus menyelenggarakan evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan guru harus mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran sekaligus.

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran atau pendidikan. Hal ini berarti, evaluasi merupakan kegiatan yang tak terelakkan dalam setiap kegiatan atau proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi (baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran) merupakan bagian yang integral yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran/pendidikan.

Evaluasi mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Disini seorang guru harus dapat membedakan mana kegiatan evaluasi hasil belajar dan mana kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.

Davies (Dimiyati & Mujiyono, 2002) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lainnya. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi, dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana, 1990).

Jadi evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses objek dan orang lain) berdasarkan kriteria

tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula dengan melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan kriteria. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur (pengukuran) baru melakukan proses menilai (penilaian) tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), sebelumnya disebut PMP. Dalam evaluasi banyak digunakan alat-alat antara lain test, skala sikap moral, skala perbuatan, socio matriks, catatan anekdote dan sebagainya (Saripuddin, 1989). Jadi dalam mengevaluasi hasil belajar dalam upaya pembentukan sikap nasionalisme, bisa dipergunakan skala sikap dan penalaran moral, disamping itu juga bisa di evaluasi dengan test.

BAB IV

PELAKSANAAN SIKAP NASIONALISME MELALUI PEMBELAJARAN PPKn

Dalam bagian ini akan disajikan: (1) Tujuan Pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme, (2) Materi Pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme, (3) Strategi pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme dan, (4) Evaluasi pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme.

A. Tujuan Pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme

Pada era reformasi ini bangsa Indonesia sedang berjuang menuju masyarakat bangsa dan negara

Indonesia yang lebih berbudaya, lebih demokratis, lebih berkeadilan, dan lebih menghormati hak-hak asasi manusia dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Hal itu memberikan implikasi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah diajarkan semata-mata sebagai tuntunan prilaku antar individu, tetapi perlu ditekankan sebagai tuntunan perilaku antar individu sebagai warganegara dengan negara. Oleh karena itu maka pembelajaran PPKn perlu diarahkan terhadap upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui proses pengkajian dan praktek dalam kehidupan sehari-hari dengan cerdas, baik secara rasional maupun emosional dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Disamping itu, pembelajaran PPKn menghadapi suatu tantangan baru dalam dalam upaya menerapkan konsep, nilai dan cita-cita bangsa Indonesia dalam persatuan dan demokrasi yang sudah berkembang bukan saja sebagai sistem kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi sebagai gerakan

sosial kesejahteraan dalam pergaulan berbangsa dan antar bangsa.

Dengan demikian PPKn dapat menjadi satu mata pelajaran yang bertujuan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa atau nasionalisme atas dasar semangat kebangsaan, mempersiapkan alih generasi secara bertanggung jawab dan memberdayakan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan tantangan dan ketidakpastian. Atas dasar itu dalam pembelajaran PPKn perlu mengakomodasikan berbagai isu-isu aktual yang menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks menyeluruh, seperti konflik sosial, SARA, penyalahgunaan narkoba dan pertikaian antar kelompok dan negara. Sehingga semua tantangan baru tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasikan dalam pembelajaran PPKn sebagai upaya revitalisasi PPKn berdasarkan semangat persatuan dan reformasi.

Tantangan tersebut tidak begitu saja mudah dihadapi, guru di sini harus bekerja keras, perkembangan informasi dan arus globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi menjadi tantangan yang sangat besar dalam pelaksanaan sikap. Tantangan berat yang dirasakan saat ini adalah upaya untuk

membendung dan melawan arus media yang sangat vulgar dan terbuka, kita mampu memberikan pemahaman kepada siswa akan tetapi apakah mereka mampu melaksanakan atau tidak, itu yang menjadi problem, contoh pergaulan remaja yan bebas, perkelahian antar pelajar, kita mampu memberikan pemahaman kepada mereka kalau hal itu tidak boleh, akan tetapi mereka kadang-kadang belum mampu mengaplikasikan dalam perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, guru harus mempunyai keuletan dan kreativitas yang tinggi, disamping itu guru juga harus menjadi suri tauladan bagi siswanya, sehingga siswa cenderung untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang diajarkan tentu akan dipahami, dihayati dan akan diamalkan oleh siswa dalam kehidupannya. Persatuan dan kesatuan atau nasionalisme, saling menghargai dalam demokrasi akan terlaksana dalam sikap siswa. Sikap adalah budaya, jika dibiasakan dan diarahkan kepada siswa untuk bersikap baik, maka akan terjadi perubahan sikap secara perlahan dalam diri siswa, dari tidak baik menjadi baik, dari sikap yang tidak

mencerminkan sikap nasionalis menjadi sikap yang mencerminkan sikap nasionalis.

Kebiasaan atau sikap yang dilakukan oleh siswa di sekolah, akan menjadi karakter dan sikapnya dalam kehidupan sebagai siswa, masyarakat dan bernegara, jika budaya malas dibiasakan dan dibiarkan dilakukan siswa, akan menjadi sikap mendarah daging dan sangat sulit dirubah. Akan tetapi sebaliknya, jika budaya rukun, taat aturan, sikap adil, saling menghargai, kerjasama, tenggang rasa, tolong menolong yang diajarkan dan dibiasakan oleh guru kepada siswa melalui pembelajaran, tentu budaya dan sikap seperti itu yang akan terlaksana, maka untuk pelaksanaan sikap nasionalisme siswa guru harus membiasakan dan mengajarkan hal tersebut kepada siswa, kemudian dicoba diterapkan dalam sikap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pembelajaran PPKn sebenarnya adalah memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi yang diajarkan, kemudian pemahaman tersebut disikapi dan diterapkan dalam kehidupannya. Dengan kata lain tujuan pembelajaran PPKn akan mampu memberikan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Tujuan pembelajaran PPKn akan mampu menumbuhkan pelaksanaan sikap nasionalisme dalam diri siswa ketika tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran PPKn tercapai, keseimbangan emosional akan tumbuh sebagai dasar kemampuan intelektual yang kemudian mampu diterapkan dalam kehidupannya. Tujuan kognitif, afektif dan psikomotor dalam proses pembelajaran harus menjadi target yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, termasuk dalam pelaksanaan sikap nasionalisme siswa.

B. Materi Pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme

Pengembangan materi pembelajaran PPKn tidak hanya terpaku pada buku pelajaran yang ada, akan tetapi diperluas dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, sumber tercetak misalnya majalah dan surat kabar, sumber belajar terekam seperti kaset audio dan video dan materi sumber yang tersiar seperti radio dan televisi. Permasalahan-permasalahan yang ada kemudian diangkat di kelas dengan tanya jawab atau diskusi, sehingga siswa mampu memahami dan menghayatinya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya. Dari sini

nantinya diharapkan akan bisa terlaksana sikap dalam diri siswa.

Adapun materi pembelajaran PPKn sangat luas dan membicarakan banyak aspek, sehingga dalam proses pembelajaran materi PPKn dibutuhkan guru yang kreatif, inovatif dan punya wawasan luas, sehingga mampu mengakomodasi semua permasalahan yang ada dalam materi PPKn tersebut untuk diajarkan kepada siswa agar dipahami dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik agar mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun materi pembelajaran PPKn oleh sebagian siswa dianggap sebagai mata pelajaran yang paling mudah, karena secara kognitif mereka mampu dan menguasai bahan yang ada dalam pelajaran PPKn, akan tetapi kemampuan afektif dan psikomotor masih sangat jauh dari yang diharapkan. Siswa mampu memperoleh nilai bagus dalam ujian, akan tetapi dalam pengamalan dan sikap ternyata tidak semua siswa mampu berperilaku sesuai dengan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran PPKn. Dalam artian, meskipun secara umum siswa menguasai materi pelajaran PPKn, namun belum sepenuhnya menghayati apalagi mengamalkan dalam kehidupan nyata dan

dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya guru PPKn harus lebih profesional dalam menyajikan materi PPKn agar dapat dihayati dan dilaksanakan oleh siswa, siswa tidak hanya menguasai akan tetapi secara kognitif memahami materi yang disampaikan, secara afektif mampu menghayati dan secara psikomotorik mampu melaksanakan dalam kehidupannya, inilah yang disebut dengan keberhasilan dalam pembelajaran pelajaran PPKn, jika semua aspek di atas dapat dikuasai dan dilaksanakan maka secara umum sikap sudah terlaksana dalam diri siswa.

Pokok pembahasan materi pembelajaran PPKn secara umum mendukung dalam rangka pelaksanaan sikap siswa, termasuk di dalamnya pelaksanaan sikap nasionalisme atau jiwa kebangsaan. Namun dalam upaya pelaksanaan sikap nasionalisme, tidak hanya materi pembelajaran PPKn yang perlu dikembangkan, tetapi disiplin-disiplin ilmu yang lain juga terlibat dalam menumbuhkan pelaksanaan sikap nasionalisme siswa, disiplin-disiplin ilmu yang dimaksud antara lain seperti IPS, Sejarah, Sosiologi dan banyak lagi disiplin ilmu yang lain.

Dalam upaya melaksanakan sikap nasionalisme siswa, materi pembelajaran PPKn lebih ditekankan

kepada penanaman tentang nilai-nilai, termasuk penanaman nilai persatuan dan kesatuan, sedangkan sejarah lebih kepada kisah-kisah perjuangan masa lalu yang perlu kita teladani dan dijadikan contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan sikap yang terkandung dalam materi pelajaran merupakan tugas utama guru PPKn. Sehingga pelaksanaan sikap nasionalisme merupakan tantangan cukup berat yang harus dihadapi oleh guru PPKn, termasuk sikap siswa sendiri terhadap pelajaran PPKn, bagi guru PPKn, kesulitan menerapkan materi pembelajaran adalah bagaimana membawa nilai-nilai moral dibentuk dalam diri siswa agar mampu dihayati dan dilaksanakan.

C. Strategi pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme

Strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan, agar apa yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran bisa diterima dengan mudah oleh siswanya, sehingga berbagai strategi harus ditawarkan dan dicoba dalam pembelajaran dalam kelas. Untuk membangun kesadaran peserta didik dalam proses pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran, salah

satu strategi yang saya maksud disini adalah penggunaan metode pembelajaran yang tepat, karena penggunaan metode atau strategi pembelajaran dengan tepat dan terampil akan membantu tujuan pembelajaran, maka hendaknya seorang guru dalam proses pembelajaran dalam kelas harus memperhatikan hal tersebut, sehingga seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan pembelajaran tersebut secara tepat.

Strategi pembelajaran merupakan serangkaian tindakan efektif, terencana dan terarah agar dapat mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran PPKn yang dimaksud. Strategi pembelajaran merupakan usaha untuk memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam GBPP dijelaskan bahwasanya pembelajaran PPKn tidak semata-mata mengajukan pengetahuan, akan tetapi bagaimana supaya siswa juga mampu menghayati dan mengamalkan apa yang terdapat dalam materi pembelajaran PPKn tersebut dalam kehidupannya.

Pada dasarnya PPKn dapat menjadi mata pelajaran yang berfungsi memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar semangat kebangsaan,

mengembangkan demokratisasi. Atas dasar itu melalui pembelajaran PPKn dapat dikembangkan berbagai kemampuan dasar siswa sebagai warganegara seperti berfikir kritis, mengambil keputusan, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggung jawab atas ucapan perbuatannya, beriman dan bertaqwa sesuai dengan agamanya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keputusan bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap seperti inilah yang ingin dibentuk sehingga jiwa nasionalisme menjadi jiwa dan sikap yang mendarah daging dalam kehidupan siswa. Jika sikap nasionalisme sudah terlaksana, maka harapan menjadi masyarakat yang bersatu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam menentukan strategi pembelajaran agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai, maka yang pertama dilakukan adalah dengan melihat tujuan utama dari satuan pelajaran yang telah dibuat dan disiapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Penekanannya pada aspek yang mana, apakah pada aspek pengetahuan, sikap ataukah pada aspek keterampilan. Akan tetapi dalam pembelajaran PPKn

penekanan tidak diharapkan hanya pada satu aspek akan tetapi penekanan diharapkan pada pemahaman kepada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap secara menyeluruh, dengan harapan akan mampu membentuk sikap siswa dalam kehidupannya. Jadi dengan belajar PPKn siswa tidak hanya mengetahui penekanan nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung, akan tetapi mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan belajar PPKn akan mampu menumbuhkan pelaksanaan sikap yang tidak hanya memahami akan tetapi mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan yang diaplikasikan dibuktikan dengan sikap rukun, lebih bijaksana, bertanggung jawab, adil dan menghormati orang lain.

Kegiatan pembelajaran tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, akan tetapi untuk mencapai tujuan pembelajaran penggunaan strategi komprehensif akan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berfikir secara kritis, rasional, kreatif dan tanggap terhadap isu-isu kewarganegaraan serta bisa ikut berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, sehingga siswa dapat menjadi warga negara yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bangkitnya motivasi siswa, sikap kritis dan tanggap terhadap masalah-masalah aktual yang berada di masyarakat merupakan ciri dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk memberikan kepada peserta didik dalam hal: (1) berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) pelaksanaan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia.

Dalam proses pembelajaran, tindakan pertama yang harus dilakukan guru adalah membuat simpati dan memotivasi siswa bahwa mereka dapat melakukan seperti kelas yang lain. Dengan demikian, maka siswa tidak merasa dikucilkan dan dianggap rendah. Dengan demikian maka guru akan lebih mudah mengembangkan iklim kelas menjadi kondusif.

D. Evaluasi Pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan sikap nasionalisme

Ada banyak beberapa bentuk evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru untuk melihat tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswanya, evaluasi secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) test dan, 2) Alternative Assignment/Non test.

Evaluasi dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan dan memberikan materi pelajaran yang sudah disampaikan, apakah materi yang disampaikan hanya di fahami hanya dalam aspek kognitif saja, ataukah materi tersebut difahami dalam semua aspek baik kognitif, afektif dan pengamalannya dalam tindakan sosial atau psikomotor.

Terkait dengan hal tersebut, maka evaluasi sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswanya, apakah sudah mampu melaksanakan sikap dalam dirinya, atau hanya sekedar faham terhadap apa yang disampaikan akan tetapi tidak mampu diterapkan dalam tindakannya. Untuk itu guru harus mempunyai cara dalam melakukan evaluasi, agar hasil evaluasi sesuai

dengan harapan, maka bentuk-bentuk evaluasi harus dikuasai dan diterapkan, secara umum model evaluasi dibagi dua yaitu model test dan non test. Model test kemudian dikembangkan dalam dua kategori yaitu *pertama* test tulis dan *kedua* test lisan, namun pada tes tulis ini kecenderungan subyektifitas yang dilakukan oleh siswa jika tidak diawasi dengan ketat, seperti kerjasama ketika guru meninggalkan ruangan. Akan tetapi jika tes lisan dipakai dalam evaluasi maka kesempatan untuk bertanya kepada orang lain teman-teman siswa yang lain yang sangat sulit, karena guru berhadapan langsung dengan siswa yang bersangkutan.

Kemudian model evaluasi yang kedua yaitu *alternative assignment/non test*, dikembangkan oleh guru kepada siswanya dengan beberapa model seperti membuat; makalah, resume, diskusi, dan presensi.

Dari pembelajaran PPKn guru berusaha menguraikan materi dan strategi pembelajaran untuk membentuk sikap nasionalisme siswa. Pada tataran pelaksanaan guru PPKn telah berupaya menumbuhkan pelaksanaan sikap nasionalisme secara implisit pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Upaya pelaksanaan ini dilakukan dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan nasionalisme, meskipun dalam

satuan pelajaran tidak dirumuskan sebagai materi pelajaran.

Dalam mengevaluasi sikap siswa, guru dapat melihat bagaimana cara siswa bergaul dan berkomunikasi dengan sesama siswa, dengan gurunya dan prestasi-prestasi ekstrakurikuler yang mereka ikuti dan geluti. Sikap siswa tersebut tidak hanya dilihat dari kesuksesannya secara kognitif dalam menjawab pertanyaan dan soal yang diberikan oleh guru, akan tetapi bagaimana sikap tersebut juga dilihat dari bagaimana keseharian siswa dalam beraktivitas dalam sekolah maupun diluar sekolah.

Idealnya dalam mengukur/mengevaluasi sikap siswa, guru harus menawarkan evaluasi yang bersifat komprehensif, seperti mencoba mengukur kemampuan siswa dengan tes dan melihat aspek kognitif, psikomotor dengan menggunakan skala, baik Likert maupun Thurstone. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa para guru tidak pernah mencoba menerapkan bentuk-bentuk tersebut dalam mengukur sikap siswa.

Sebagai guru yang baik, maka guru harus melihat, membina dan membentuk siswanya dari berbagai aspek, sehingga akan memudahkan guru

dalam menumbuhkan pelaksanaan sikap dan karakter siswanya, dimana jika seorang guru mengetahui kelemahan siswanya, maka guru akan lebih mudah mencari jalan keluar atau problem solving. Sehingga upaya-upaya kongkrit yang dilakukan oleh guru tidak sia-sia, dan pelaksanaan sikap nasionalisme siswa melalui evaluasi pembelajaran PPKn bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. (1964). *Kobarkan terus api islam*. Djakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Achmadi. (1984). *Ilmu pendidikan*. Salatiga: CV Saudara.
- Ahmadi, A. (1999). *Psikologi sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Arfa, F.A. (1999). *Komunalisme dan ancaman disintegrasi*. Diambil pada tanggal 21 juni 2004 dari, <http://www.waspada.com/093099/artikel1.htm>.
- Azwar, S. (2002). *Sikap manusia teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Beane, J. A. et. al. (1986). *Curriculum planning and development*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

- Bodgan, Robert & Sari Knopp Biklen. (1982). *Qualitatif research for education: and introduction to theory and methode*. Boston: Allyn & bacon Inc.
- Borgotta, E.F. (1992). *Encyclopedia of sociology*. Volume 3, New York: Macmillan Publishing Company.
- Bung Karno. (1958) *Pantjasila dasar filsafat negara*. Jakarta: Jajasan Empu Tantular.
- Danim, S. (1995). *Media komunikasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmodihardjo, D. dkk. (1981) *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Degeng, I.N.S. (1993) *Buku pegangan teknologi pendidikan, terapan teori kognitif dalam desain pembelajaran*. Jakarta: PAU-UT.
- Dimiyati & Mudiono. (2002). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djahiri, K. (1991). *Pendidikan pancasila II*. Jakarta: Depdikbud
- Djanuarto, B.D. (2001). *Konflik aceh, antara nasionalisme dan HAM*. Diambil pada tanggal 21 juni 2004 dari, <http://www.sosialista.org/catatan.html>
- Ensiklopedia indonesia*, (1980) Volume 2, Jakarta: Ichtiar Baru.

- Gagne, R.M. (1977). *The conditions of learning*. New York: Holt, Rinehart & Winston
- Gagne, R.M. & Briggs, L.J (1979). *Principles intructional design*. New York: Hol, Rinehart & Winston.
- Haikal, H. (2003). *Berkenalan dengan bung karno dan kebangsaan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 042. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hatta, M. (1945). *Kumpulan karangan*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kaelan. (2001). *Pendidikan pancasila*. Paradigma: Yogyakarta.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 way to enhance values & morality in schools and youth settings*. Boston: Allyn & Bacon
- Kirpatrick, D.L. (1994). *Evaluating training programs the four levels*. Berrett-Koehler Publishers San Francisco.
- Knowles, M. (1979). *The adult learner: a neglected species, second edition*. Gulf Publishing Company Book Devision. Houston, Paris, Tokyo.
- Kohn, H, (1961). *Nasionalisme: Arti dan sejarahnya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Krisna, D, (1993). *Kompas politik international*. Jakarta: Pustaka Jaya

- Lexy, J. Moleong, (1995). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Linda, N. & Eyre R. (1995). *Teaching your children values*. New York: Simon and Chuster.
- Maman. (2000). Reposisi, re-evaluasi dan redefenisi pendidikan nilai bagi generasi muda bangsa. *Pendidikan dan Kebudayaan*, 23. Diambil pada tanggal 21 Juni 2004, dari <http://www.pdk.go.id./jurnal/23/reposisi.htm>
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications Ltd.
- Mudjiono & Hadisusanto, Dirto, (1985). *Metode diskusi*. Jakarta: Depdikbud.
- Mukminan, dkk. (1998). *Belajar dan pembelajaran*. Yogyakarta: P4G IKIP Yogyakarta.
- Pasha, M. K. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan (civic education)*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Poespoprodjo. (1986). *Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Reimer, j, et al. (1979). *Promoting moral growth from piaget to kohberg*. New York & London: Longman Inc.
- Roem, M. (1972). *Bunga rampai dari sedjarah*. Djakarta: Bulan Bintang.

- Roestiyah. (1982). *Masalah-masalah ilmu keguruan*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____. (1991). *Strategi belajar mengajar, salah satu unsur pelaksanaan strategi belajar mengajar, teknik penyajian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Slameto. (1995). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1983). *Kamus sosiologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soemantri, M.N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung:Remaja rosdakarya.
- Subandrio. (2002). *Peningkatan pendidikan moral pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan pendekatan komprehensif di sekolah menengah umum (SMU) negeri 2 Bantul tahun pelajaran 2001/2002*. Tesis master, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudibyso, S. (1999). *Citra bung karno, anallisis berita pers orde baru*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Sudirdjo. (1991) *Strategi belajar mengajar*. Yogyakarta : FIP IKIP Yogyakarta.
- Sukaya, dkk. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Paradigma: Yogyakarta.
- Sukarno. (1965). *Dibawah bendera revolusi*. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

- Sukidi. (2003). *“Resep” salah bagi problem aceh*. Diambil pada tanggal 21 juni 2004 dari, <http://www.sufinews.com/index>.
- Surakhmad, W. (1982). *Pengantar interaksi mengajar belajar*. Bandung : Tarsito.
- Suryadinata, dkk. (2003). *Indonesia’s population ethnicity and religion in a changing political landscape*. ISEAS. Institute of Southeast Asian Studies.
- Suyono, A. (1985). *Kamus antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syah, M. (1995). *Psikologi pendidikan suatu pendekatan baru*. Bandung : remaja Rosdakarya.
- Syukri, A.F. (2003). *Peran pemuda dalam 20 tahunan siklus nasioanlisme indonesia (refleksi 75 tahun soempah pemoeda, 1928-2003*. Diambil pada tanggal 21 juni 2004 dari, <http://ppi.jepang.org/article.php?id:1>
- Tilaar, H.A.R, (1999). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Tower S. L, (1987). *Ideologi-ideologi politik kontemporer* (terj. A.R. Henry Sitanggang). Jakarta: Erlangga.
- Udin Saripuddin. (1989) *Konsep dan strategi pendidikan moral pancasila di sekolah menengah (studi penelitian kepustakaan)*. Depdikbud: Universitas Lampung.

Walgito, B. (1980). *Psikologi sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

Zuchdi, D. (1995). *Pembentukan sikap*. Cakrawala pendidikan No.3. Th. XIV. November. Yogyakarta : LPM IKIP Yogyakarta h. 51-63.

RIWAYAT HIDUP



Akhmad Asyari, lahir di Bunklotok Lombok Tengah, tanggal 21 Juni 1978, anak ke-3 dari pasangan H. Najamuddin dan Hj. Nurmin. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Bunklotok tahun 1987, MTs Da'wah Islamiyah Kediri Lombok Barat tahun 1993, MAN 2 Mataram tahun 1996. Melanjutkan program S1 pada Jurusan Kependidikan Islam pada saat itu masih IAIN Mataram cabang Sunan Ampel Surabaya, kemudian berubah status menjadi STAIN Mataram selesai tahun 2000, selanjutnya menyelesaikan S2 Program Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan studi ke Universitas Negeri Jakarta dan selesai pada tahun 2016 dengan

konsentrasi Teknologi Pendidikan. Sejak tahun 2007 menjadi dosen tetap di IAIN Mataram sekarang UIN Mataram. Pada tahun 2006 menikah dengan Mase Pujiati, ST dan dikarunia tiga putra putri: Muhammad Alif Ramdani, Muhammad Yazid Arzak dan Fariha Sulistia Ismi. Pernah di percaya menjadi Sekertaris Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, kemudian menjadi Kajur di tempat yang sama, setelah itu dipercaya menjadi Sekertaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Mataram, dan pada tahun 2017-sekarang dipercaya menjadi Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.

Tentang Penulis



Akhmad Asyari, lahir di Bunklotok Lombok Tengah, tanggal 21 Juni 1978, anak ke-3 dari pasangan H. Najamuddin dan Hj. Nurmin. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Bunklotok tahun 1987, MTs Da'wah Islamiyah Kediri Lombok Barat tahun 1993, MAN 2 Mataram tahun 1996. Melanjutkan program S1 pada Jurusan Kependidikan Islam pada saat itu masih IAIN Mataram cabang Sunan Ampel Surabaya, kemudian berubah status menjadi STAIN Mataram selesai tahun 2000, selanjutnya menyelesaikan S2 Program Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan studi ke Universitas Negeri Jakarta dan selesai pada tahun 2016 dengan konsentrasi Teknologi Pendidikan. Sejak tahun 2007 menjadi dosen tetap di IAIN Mataram sekarang UIN Mataram. Pada tahun 2006 menikah dengan Mase Pujati, ST dan dikarunia tiga putra putri: Muhammad Alif Ramdan, Muhammad Yazid Arzak dan Fariha Sulistia Ismi. Pernah di percaya menjadi Sekertaris Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, kemudian menjadi Kajar di tempat yang sama, setelah itu dipercaya menjadi Sekertaris Lembaga



Elhikam Press Lombok

Jl. Maitahan Raya Blok E/11 Mei Ia Rengas,
Baju Lingsar, Lombok Barat NTB 8308
Telp. 0812740177606,
e-mail: elhikampresslombok@gmail.com

